



Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya

Bahasa & Seni

Tahun 42, Nomor 2, Agustus 2014
ISSN 0854-8277

BAHASA DAN SENI

Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya

Terbit dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus (ISSN 0854-8277) berisi artikel-artikel ilmiah tentang bahasa, sastra, seni, dan hubungannya dengan pengajaran, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun asing. Artikel yang dimuat berupa analisis, kajian, dan aplikasi teori, hasil penelitian, dan pembahasan kepustakaan.

Ketua Penyunting
Suyono

Wakil Ketua Penyunting
Nurul Murtadho

Penyunting Pelaksana
Yuni Pratiwi
A. Effendi Kadarisman
Nur Mukminatien
Moh. Khasairi
Herri Akhmad Bukhori
Mistaram

Sekretaris
Moch. Syahri

Pelaksana Tatausaha
Kristina Hestningsih

Alamat Penyunting dan Tatausaha: Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon (0341) 551-312 psw. 235/236, Langsung/Fax. (0341) 567-475, Website: sastra.um.ac.id • <http://www.um.ac.id> E-mail: bahasaseni.journal@um.ac.id Langganan 2 nomor Rp. 100.000,- (setahun) + ongkos kirim. Uang langganan dikirimkan melalui Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Universitas Negeri Malang (Jl. Surabaya 4, Malang 65145), Rekening No 5598736-5 a.n. Ibu Kristina Hestningsih. Desain sampul oleh Moch. Abdul Rohman.

BAHASA DAN SENI diterbitkan oleh Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. **Dekan:** Dawud. **Pembantu Dekan I:** Yazid Basthomi. **Pembantu Dekan II:** Suharmanto. **Pembantu Dekan III:** Moh. Ainin. Terbit pertama kali pada tahun 1969 dengan nama **WARTASCIENTIA**

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik dengan 2 spasi pada kertas A4, panjang 12-20 halaman. (lihat Petunjuk bagi Penulis pada sampul bagian belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh Mitra Bestari. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Jurnal ini diterbitkan di bawah pembinaan Tim Pengembangan Jurnal Universitas Negeri Malang.

Pembina: Suparno (Rektor). **Penanggungjawab:** Hendyat Sutopo (Pembantu Rektor I). **Penanggungjawab Bidang Akademik:** Toto Nusantoro. **Penanggungjawab Bidang Administrasi:** Gatot Isnaini. **Ketua:** Ali Saukah. **Anggota:** Suhadi Ibnu, Amat Mukhadis, M. Guntur Waseso, Suyono, Margono, Imam Agus Basuki, Effendy, Amin Sidiq, Aminarti S. Wahyuni, Ma'arif. **Pembantu Teknis:** Wahyudi Setiawan, Rahayu Martini, Suwandi. **Pelaksana Administrasi:** Subandi, Arif Wicaksono, Ahmad Fadhilah, Lilik Nuryanti, Listiani.

BAHASA DAN SENI

Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya

Tahun 42, Nomor 2, Agustus 2014

Daftar Isi

Developing a Writing Workbook for Indonesian College Students of English, 137-142

Ary Setya Budhi Ningrum

Penerjemahan Kalimat Kondisional Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris: Kajian Sintaksis dan Semantik, 143-153

Iis Kurnia Nurhayati

Kepadatan Leksikal Paragraf Skripsi Berbahasa Inggris: Analisis Unsur *Qualifier*, 154-167

A. Djawad Mubasyir

A Checklist to Assess the Use of Discourse Markers in Students' Writing, 168-176

Erma Sujiyani, Atiqah Nurul Asri, Maya Rizki Fauzia, dan Nur Mukminatien

Aspek-Aspek Linguistik dalam Proverba Bahasa Inggris, 177-193

Iqbal Nurul Azhar

Tipologi Kausatif Formal Bahasa Jawa Kuna, 194-202

Ni Ketut Ratna Erawati

Wortschatzerinnerungskarte: Menguasai Bahasa Melalui Kosakata, 203-213

Rofi'ah

Penerapan Pembelajaran Tuntas untuk Pokok Bahasan Gramatika dan Kosakata di SMA, 214-232

Rosyidah dan Deddy Kurniawan

A Postmodern Understanding of Toni Morrison's *Sula*, 233-241

Rosyida Ekawati

Kesantunan Tindak Tutur Direktif Anggota DPRD, 242-250

Syafruddin dan Siti Suwadah Rimang

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Hasil Akreditasi Berkala Ilmiah *Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi*, Jurnal Bahasa dan Seni ditetapkan sebagai berkala ilmiah yang terakreditasi

KESANTUNAN TINDAK TUTUR DIREKTIF ANGGOTA DPRD

Syafruddin dan Siti Suwadah Rimang

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract: Gentle, polite, courteous, systematic, organized, clear, and straight forward use of language reflects a speaker's personality and culture. Everyone, including the members of the South Sulawesi Parliament, is expected to maintain good manner and ethic in communication. The study aims to describe and explain declarative, interrogative, and imperative forms as well as speech act strategies used by the members of the South Sulawesi Parliament. The qualitative study employed the functional approach on language. The study was conducted in the South Sulawesi Parliament House. The data of the research were obtained from speech acts, field observations and interviews. The stages of data collection are 1. Preparation, 2. Recording, 3. Observation, 4. Interview, and 5. Transcription. The data were analyzed by the following procedures: 1. data reduction, 2. data presentation and interpretation, and, 3. data conclusion and verification. The findings revealed that there were various forms of politeness used by the respondent. Moreover, the locution act was the more dominant strategy used by the respondent than the illocutionary act.

Key Words: politeness, speech act, directive

Abstrak: Penggunaan bahasa yang lemah lembut, sopan, santun, sistematis, teratur, jelas dan lugas mencerminkan pribadi penuturnya dan budaya pemakainya. Semua orang—termasuk anggota DPRD—dituntut menggunakan bahasa yang santun. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk-bentuk deklaratif, interogatif, dan imperatif, serta strategi kesantunan tindak tutur direktif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian kualitatif ini menggunakan orientasi teoretik linguistik fungsional. Lokasi penelitian di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Data penelitian meliputi tuturan anggota DPRD, catatan lapangan, dan hasil wawancara. Data dikumpulkan dengan tiga teknik: perekaman, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman (1984). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adanya bentuk kesantunan yang bervariasi dalam tuturan anggota DPRD, dan (2) strategi penyampaian langsung lebih dominan digunakan daripada strategi tidak langsung.

Kata-kata Kunci: kesantunan, tindak tutur, direktif.

Kesantunan dapat ditunjukkan tidak hanya "masuk" lebih sopan daripada tuturan dalam bentuk tindakan, tetapi juga dalam "Masuk!". Penggunaan bahasa yang lemah bentuk tuturan. Misalnya tutur "silakan" lembut, sopan, santun, sistematis, teratur,

jelas dan lugas mencerminkan pribadi penuturnya dan budaa peakainya (Brown dan Yule, 1996).

Norma sosial dan budaya suatu masyarakat senantiasa berubah seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut tampak dengan jelas dalam penggunaan bahasa masyarakat Indonesia saat ini seperti kesantunan berbahasa para anggota DPR yang diberitakan sejumlah media massa kurang dapat memberi contoh yang baik.

Berdasarkan fakta-fakta dan asumsi teoritis tersebut, maka penulis telah melaksanakan penelitian dengan masalah pokok mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana bentuk dan strategi kesantunan tindak tutur anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Lembaga Legislatifnya. Secara khusus penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk deklaratif, interogatif, dan imperatif dan strategi kesantunan tindaktutur direktif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Lembaga Legislatifnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah berkontribusi terhadap pembinaan dan pelestarian norma sosial budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Dalam upaya memelihara hubungan sosial antar anggota masyarakat dalam suatu kebudayaan, sarannya adalah bahasa sebagai alat komunikasi dengan fungsi fatik dan fungsi konatif. Fungsi fatik ditentukan dengan adanya ungkapan yang *empan papan*, sedangkan fungsi konatif tercermin dalam ungkapan hormat dan sungkan. Tidak berjalannya fungsi bahasa, misalnya fungsi fatik dan konatif, akan berpengaruh terhadap kebudayaan.

Bahasa juga memiliki kesopanan dalam berbahasa "unda-usuk" atau sering dikenal "kesantunan berbahasa". Baik dalam ragam berbahasa lisan maupun dalam ragam bahasa tulis. Ketidaksantunan dalam berbahasa akan menciptakan ungkapan-ungkapan yang sarkastik dalam komunikasi.

Analisis tindak tutur adalah tugas ilmu pragmatik yang bertujuan memberikan pemerian penggunaan bahasa yang dilakukan partisipan dalam situasi tertentu. Dalam setiap peristiwa komunikasi dengan bahasa selalu ada "pembicara" (B) dan "pendengar" (D). Biasanya situasi (S) tempat B dan D berkomunikasi merupakan salah satu yang juga ada. Selanjutnya partisipan melakukan tindak bahasa (T). Pada saat melakukan T, B secara simultan mengujarkan bunyi (u), menghasilkan tindak proposisi (p), dan tindak ilokusi (i).

Salah satu tindak ilokusi adalah direktif. Secara umum, tindak direktif didefinisikan sebagai suatu tindak tutur yang mengekspresikan maksud atau keinginan penuturnya agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki penutur. Hal itu sejalan dengan Holmes (2000), bahwa ujaran linguistik yang bersifat direktif ditujukan kepada seseorang agar mau melakukan sesuatu.

Berdasarkan maksud dan tujuan tindak tutur personal, direktif (*directives*) dibe-dakan menjadi: tindak memesan, meme-rintah, memohon, menuntut, dan memberi nasihat. Searle (2001) menegaskan bahwa keragaman jenis tindak tutur direktif terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan penutur (Pn) agar mitra (Mt) melakukan sesuatu. Usaha-usaha itu mulai dari yang paling halus, seperti ketika Pn meminta atau menyarankan Mt melakukan sesuatu, hingga yang kasar, seperti paksaan sewaktu Pn mendesak agar Mt melakukan sesuatu.

Dilihat dari segi maknanya, bentuk tindak tutur direktif dapat bermakna literal dan nonliteral. Untuk menafsirkan literal atau tidak literalnya tindak direktif, peranan konteks seperti pengetahuan perseptual, pengetahuan awal, pengetahuan tipe wacana, pengetahuan tindak tutur dan latar belakang institusional, serta pengetahuan tentang dunia sangat diperlukan agar tercipta adanya pemahaman bersama antara Pn dan Mt terhadap pemaknaan tersebut. Pemahaman

bersama tersebut menunjukkan adanya kompetensi linguistik dan kompetensi komunikatif yang sama antara Pn dan Mt.

Bentuk direktif biasanya ditandai oleh penanda-penanda formal tertentu. Direktif dalam kelompok *permintaan* biasanya diwujudkan dalam struktur: (a) tuturan yang terdiri atas predikat verba dasar atau adjek-tiva, atau pun frasa proposisional yang sifatnya tak transitif, dan (b) pada umumnya tuturan dimarkahi oleh berbagai kata tugas modalitas, misalnya *mohon, tolong, harap*. Direktif kelompok *pertanyaan* diwujudkan dalam struktur (a) tuturan yang menghendaki jawaban ya atau tidak, (b) tuturan menghendaki suatu informasi, (c) tuturan yang menghendaki jawaban berupa perbuatan, (d) tuturan dimarkahi dengan kata-kata tanya, misalnya *apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaiman* dengan partikel *-kan* atau tidak. Direktif kelompok *perintah* diwujudkan dalam struktur yang sama dengan direktif kelompok *permintaan*, tetapi hal yang membedakannya adalah modalitas yang digunakan. Modalitas yang sering melekat pada kelompok direktif ini misalnya *ayo, coba, dan hendaklah*. Direktif kelompok *larangan* juga diwujudkan seperti kelompok *permintaan* dan *perintah*. Yang membedakan juga modalitas yang digunakan. Modalitas yang digunakan misalnya *jangan* yang diikuti atau tidak oleh partikel *-lah*. Jenis direktif *persilaan* atau *pengizinkan* juga sejenis dengan direktif *melarang*. Hanya saja, modalitas yang biasanya melekat adalah *silakan, biarlah, diperkenankan, dan diizinkan*. Direktif kelompok *nasihat* diwujudkan sama dengan direktif kelompok *pengizinkan*. Hanya saja, direktif kelompok *nasihat* menggunakan modalitas *mari, harapyang* juga kadang-kadang *ayo, coba, hendakny, dan hendaklah* (Alwi, 1992).

METODE

Kajian ini beranjak dari pendekatan fungsional. Jenis penelitian adalah kualitatif

yang mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena berbahasa dalam bentuk, dan strategi berbahasa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang mengemban kesantunan. Lokasi penelitian di Kantor DPRD Sulawesi Selatan. Data penelitian ada dua jenis, yang meliputi data tuturan dan data catatan lapangan serta wawancara. Sumber data adalah semua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Peneliti secara aktif melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap subjek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data adalah perekaman dan wawancara. Data tuturan anggota DPRD ditranskripsi selanjutnya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai data terpilih kemudian dianalisis menggunakan prosedur analisis data kualitatif menggunakan teori kesantunan, tindak tutur, serta pragmatik. Hasil penelitian divalidasi dengan cara sebagai berikut. *Pertama*, perpanjangan keikutsertaan peneliti. *Kedua*, data yang ditemukan dalam bentuk teks secara sistematis kemudian dicek kembali untuk mengetahui kelengkapan dan keakuratannya. *Ketiga*, melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan sebagai bahan perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kesantunan Tindak Tutur Direktif Anggota DPRD

Bentuk Kesantunan dalam Tuturan Bermodus Imperatif

Hasil penelitian ini mengungkapkan bentuk kesantunan dalam modus imperatif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya menggunakan BI untuk meminta penjelasan dan memerintah dengan alternatif bentuk sapaan berupa (1) istilah kekerabatan, (2) disertai alasan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan (3)

nama d
tersebut

135.
Oke.
selan
masi
berta

Angg

Jadi
sawa

Kont
Kadi
deng

49.
(KD

P.Ta

K.K.

P. Ta

Kont
Kom

yang
seor
dala

82. P

yang
infor
yang

Staf,
satu

Kont
Kom

dari
keha

Be

memin

[135] c

impera

kesantu

pada

pemaka

Oke s

diserta

Denga

nama diri sebagai penanda kesantunan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

135. Ketua komisi

Oke, singkat saja untuk kesempatan selanjutnya Pak Amir. Singkat saja karena masih ada evaluasi. Yang lain juga mau bertanya. Silahkan! (KB/Impt/mt/ptn)

Anggota komisi (Pak Amir)

Jadi terkait masalah percetakan sawah.....

Konteks: *Ketika mempersilakan Pak Kadis Pertanian menjelaskan kinerjanya dengan suasana akrab.*

49. K.K.D : Yang lain saja! (KD/Impt/Pr/tol)

P.Taksi Putra : Assalamualaikum...

K.K.D : Siapa ini?

P. Taksi Putra : Dari taksi Putra.

Konteks: *Tuturan disampaikan oleh Ketua Komisi D setelah mendengar penjelasan yang kurang menyakinkan dari salah seorang dari Asosiasi Pengusaha Taksi dalam suasana serius*

82. KKA: Catat tadi itu! Bahasanya tamu yang saya Tanya. Tapi saya tidak dapat informasi, ada penyampaian, kalau ada yang mau penelitian unismuh?

Staf, pak Munif oh begitu, ini yang satu dek? (KA/impr/pr/KPID)

Konteks: *Tuturan disampaikan Ketua Komisi A setelah mendengar penjelasan dari Peneliti tentang latar belakang kehadirannya di ruang sidang.*

Bentuk imperatif dengan maksud meminta dari anggota DPRD dalam tuturan [135] ditandai frasa *singkat saja ...!* Bentuk imperatif meminta [135] berorientasi kepada kesantunan berbahasa. Hal tersebut tampak pada panjang pendeknya tuturan dan pemakaian penanda kesantunan seperti kata Oke sebagai tanda keakraban, sapaan Pak disertai nama orang, serta kata silakan. Dengan berbagai penanda kesantunan

tersebut, tuturan [135] terkesan tidak menekan mitra tuturnya.

Berbeda dengan [49 dan 82] bentuk imperatif dalam tuturan anggota DPRD tidak disertai honorifik, ada alasan atau penjelasan dari anggota DPRD tetapi tidak mempertimbangkan pilihan kata yang halus sehingga walau rasional tetap terkesan kurang menyenangkan. Hal tersebut tampak pada penggunaan kata-kata yang lugas seperti siapa ini? [49]. Begitu pula [82] ... tapi bahasanya tamu yang saya tanya. Hal tersebut membuat tamu kurang dihargai. Tuturan [49 dan 82] disampaikan dengan nada serius. Hal itu disebabkan para tamu tampak terlihat kurang tertib dan cenderung ingin memaksakan pendapatnya kepada ketua komisi.

Bentuk Kesantunan berupa Tuturan Bermodus Interogatif

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa percakapan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang berbentuk interogatif dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan melarang. Hal tersebut secara jelas tampak pada data [1, 6, 12, 136] dan larangan [36] sebagai berikut.

1. Alat berat tidak bisa ya? Rencana Penanggulangan sementara kapan? (KD/Impr/mt/btt)

6. Terus kalau jalan alternatif yang kita lewati kemarin? Kalau alatnya dikasi jalan sendiri tidak dikasi naik mobil? Yang saya tanyakan kalau lewat di pinggir sawah? (KD/intr/mt/btt)

12. Nah disana bagaimana mau panen kalau begini? Nah jangan sampai kami kehilangan lagi kepercayaan masyarakat dan bukan cuman saya pribadi kalau dia kan mungkin tak masalah dan dia akan katakan bahwa ini kan janji politik orang makassar bidang " paballe-paballe gitu, ini yang harus kita antisipasi. (KD/intr/mt/btt)

Konteks: *Ketua komisi D menanyakan pelaksanaan perbaikan bendungan yang*

jebol. Pertanyaan disampaikan dalam bentuk interogatif dengan maksud meminta klarifikasi atau penjelasan. Tampak ketua komisi mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada mitra tuturnya. Selain itu anggota komisi D berupaya mendesak mitra tuturnya agar ada solusi efektif mengerjakan bendungan tanpa mengorbankan petani. (data 1, 6,12).

136. Bagaimana caranya supaya kondisi yang dirasakan tadi oleh masyarakat yang bisa mencapai 16 ton per hektar bisa dirasakan oleh masyarakat kita pada umumnya?(KB/intrg/mt/ptn)

Konteks: *Tuturan disampaikan setelah mendengar penjelasan Pak Kadis Pertanian menjelaskan kinerjanya dengan suasana akrab.*

36.K.K.D : Saya tidak bisa langsung mulai kalau begini! Siapa yang bicara? Jangan berbicara di ruangan ini selain orang yang saya beri kesempatan.....ya!

APTm : Siap (KD/intrg/mt/APTM)

Konteks: *Ketua komisi D tampak kesal melihat tingkah laku APTM (Asosiasi Pengusaha Taksi Makassar) yang kurang tertib pada saat sidang berlangsung.*

Berdasarkan data-data bentuk interogatif untuk meminta klarifikasi [1,6,12,136] dan larangan [36] berasosiasi dengan kesantunan berbeda-beda terkait fungsi direktif yang dinyatakannya. Penanda interogatif data [1] adalah kapan disertai intonasi tanya. Pada data [6] adalah kata *kalau* disertai intonasi tanya, sedangkan pada data [12 dan 136] ditandai kata tanya *bagaimana* dan kata ganti *kita* sebagai wujud kebersamaan untuk menghaluskan tujuan. Pada data [36] bentuk interogatif ditandai kata tanya *siapa*.

Bentuk interogatif tersebut berorientasi pada kesantunan berbahasa anggota DPRD Sulsel dalam ruang sidang untuk meminta. Hal itu terlihat pada data [1] didahului tuturan basa-basi (alat berat tidak bisa ya)

disertai nada yang ramah sebelum menyampaikan permintaan akan penjelasan kapan proyek perbaikan itu segera dikerjakan karena masyarakat sangat memerlukannya. Untuk bentuk kesantunan permintaan pada data [6] tampak pada panjang pendeknya tuturan, penggunaan kata *kalau* berulang-ulang yang berfungsi untuk tidak menekan mitra tuturnya. Sedangkan imperatif permintaan pada data 136 ditandai kata tanya *bagaimana* untuk menghaluskan tujuan.

Berbeda dengan bentuk interogatif pada kesantunan berbahasa anggota DPRD Sulsel dalam ruang sidang untuk melarang. Hal itu terlihat pada data [36] yang terkesan tegas, namun disertai alasan yang rasional. Ketegasan itu tampak pada data [36] yang didahului frasa *tidak bisa* disertai intonasi tinggi namun dengan ekspresi yang ramah. Dengan demikian, bentuk interogatif untuk melarang pada data [36] lebih tegas dari pada data [1 dan 6], namun keempat data tersebut tetap berorientasi kesantunan.

Bentuk Kesantunan berupa Tuturan Deklaratif

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk kesantunan dalam tindak direktif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga disampaikan dalam modus deklaratif berikut ini.

7. Kalau kita mau menunggu sampai selesai masyarakat panen semakin banyak menderita, gitu loh. (KD/dek/mt/btt)

Konteks: *Anggota komisi D berupaya mendesak dan menyakinkan mitra tuturnya agar ada solusi efektif mengerjakan bendungan tanpa mengorbankan petani.*

12. Nah disana bagaimana mau panen kalau begini? Nah jangan sampai kami kehilangan lagi kepercayaan masyarakat. Dan bukan cuman saya pribadi

kala
dia
poli
pab
anti
Kor
pih
nun
26.
per
ma
jala
yac
har
(K
Ko
pih
Bir
pe
S
pada
kalau
[12]
frasa
inter
penye
D
ran te
kesan
kalau
sehin
frasa
permi
terke
muka
kitau
pihal
mela
digu
berfu
sehin
dapa
mela
[12]
tutur

kalau dia kan mungkin tak masalah dan dia akan katakan bahwa ini kan janji politik orang makassar bidang “paballe-paballe gitu, ini yang harus kita antisipasi. (KD/intr/intrg/btt)

Konteks: *Anggota DPRD mendesak pihak PU agar tidak lagi menunda-nunda perbaikan bendungan tersebut.*

26. Baik begini saya ini meminta perjanjian awal itu yang menyangkut masalah jembatan kemudian perbaikan jalan itu sama simpang Mandai gitu yach, itu adakan! Ada? Jadi semua harus dibahas pada hari itu. (KD/dek/mt/mnst)

Konteks: *Ketua Komisi D kesal kepada pihak PU Bina Marga karena pihak PU Bina Marga tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian semula.*

Sebagai bentuk deklaratif untuk meminta pada data [7, 12, 26], ditandai pilihan kata *kalau... gitu loh!* Selanjutnya juga pada data [12] penanda permintaan ditandai *frasa jangansampai* didahului tuturan interogatif dengan maksud menyatakan penyesalan permintaan.

Dengan bentuk-bentuk seperti itu, tuturan tersebut berorientasi kesantunan. Penanda kesantunan pada data [7] seperti pilihan kata *kalau yang* memberi alternatif pilihan sehingga tak menekan mitra tutur disertai *frasa gitu loh*. Dengan frasa *gitu loh* permintaan atau suruhan anggota dewan terkesan akrab sehingga tidak mengancam muka mitra tuturnya. Terdapat pula kata ganti *kita* untuk meminimalkan tanggung jawab pihak PU sehingga dapat mendorong melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu digunakan pula dan kata tugas *semakin* yang berfungsi untuk mempertegas maksud sehingga tujuan komunikasi anggota DPRD dapat tercapai yakni pihak PU mau melakukan sesuatu. Demikian pula pada data [12] penanda kesantunan yang didahului tuturan interogatif untuk mengingatkan mitra

tutur kalau kondisi sebelumnya seperti itu sehingga tuturan meminta anggota DPRD terkesan tidak tegas. Hal yang sama dalam data, [12] digunakan frasa *jangansampai* sebagai ungkapan kekhawatiran yang didahului kata penegas *nah* sehingga dapat mendorong mitra tutur memenuhi permintaan anggota DPRD. Tampak permintaan anggota DPRD terkesan santun, karena digunakan kata ganti *kami* untuk merendahkan diri agar lawan bicara mau melakukan permintaan anggota DPRD. Akan tetapi, pada sidang waktu lain dan pihak lain anggota DPRD juga menggunakan bentuk tuturan deklaratif untuk memerintah.

Hal yang sedikit berbeda tampak pada data [26] ketegasan permintaan anggota DPRD tampak pada kata *baik* disertai intonasi naik, *dan frasa semua harus* yang tidak memberi alternatif pilihan pada mitra tutur. Akan tetapi, dengan didahului penjelasan atau urutan tutur, mitra tutur tampak mau melakukan perintah dari anggota DPRD.

Strategi Kesantunan Tindak Tutur Direktif Anggota DPRD

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian tentang strategi langsung dan strategi tak langsung ketika memerintah, meminta, dan melarang. Hal tersebut sebagai berikut.

Strategi Langsung dalam Memerintah

Hasil penelitian ini mengungkapkan strategi tindak tutur perintah berupa (a) bertutur langsung disertai alasan, (b) bertutur langsung yang menyatakan keharusan, (c) bertutur langsung dengan cara berkelakar.

2. Coba bicarakan dengan masyarakat di sana! Kan tidak terlalu (anuji) itu. Tidak dibebankan itu masyarakat di sana. (KD/Impr/pr/btt)

Konteks: *Anggota komisi D memerintahkan agar Dinas PU segera*

mempertegas kapan bendungan itu segera dikerjakan.

Bentuk tuturan [2] adalah imperatif dengan maksud memerintah. Dengan demikian anggota DPRD menggunakan strategi langsung dalam memerintah. Hal itu ditandai pilihan kata *cobayang* menghendaki tamunya agar segera mempertegas kapan bendungan itu segera dikerjakan. Dengan pilihan kata *coba* yang disertai alasan, para undangan tidak merasa ditekan karena tuturan perintah anggota DPRD disertai alasan yakni *Kan tidak terlalu (anuji) itu dan Tidak dibebankan itu masyarakat di sana.*

Strategi Langsung dalam Memerintah yang Menyatakan Keharusan

49.K.K.D : *Yang lain saja!*
[KD/imprt/pr/APTM].

P.Taksi Putra : Assalamualaikum...

K.K.D : Siapa ini?

P. Taksi Putra : Dari taksi Putra.

Konteks: *Disampaikan ketua komisi D dengan nada tinggi setelah mendengar dan melihat ulah para undangan yang kurang tertib karena dari pihak undangan berlomba ingin menyampaikan aspirasi sehingga anggota DPRD merasa kurang dihargai.*

Bentuk tuturan [49] adalah imperatif dengan maksud memerintah. Hal itu ditandai pilihan kata *saja* sehingga tidak memberi alternatif kepada para undangan (tamu). Selain itu dengan *tekanan nada suara yang tinggi*, makin mempertegas maksud perintah anggota DPRD agar para undangan menentukan juru bicaranya.

Tuturan perintah yang menyatakan keharusan tampak pula dalam percakapan berikut.

[82] Tamu: Sementara di jalan Pak!

KKA: *Catat tadi itu!* Bahasanya tamu yang saya Tanya. Tapi saya tidak dapat informasi, kalau ada penyampaian, kalau ada yang mau penelitian dari unismuh.

Staf, pak Munif oh begitu, ini yang satu dek?

Konteks: *Ketua komisi A memerintah staffnya agar mencatat alasan tamu mengapa sebagian tamu yang diharap datang belum tiba. Dan menanyakan kepada staffnya kehadiran tamu (peneliti) / mengapa ada tamu (peneliti) di ruangan itu.*

Penanda perintah tampak padakerjacobatanpa alternatif honorifik sehingga tekesan mengharuskan para undangan melakukakan keinginan anggota DPRD. Dengan kata kerja tanpa honorifik untuk memerintah pada [49 dan 82], para undangan tidak merasa ditekan karena tuturan perintah anggota DPRD dianggap penting dan wajar disampaikan dalam konteks seperti hal tersebut.

Strategi Langsung dalam Memerintah dengan Cara berkelakar

102. *Coba bicara lagi seperti itu!* Tiba-tiba bapak sebut ada sekian milliyar disampaikan oleh Bappeda pada saat ke mana, apa itu coba belum mengerti saya, apa yang bapak kemukakan itu. [KA/imprt/pr/KPID].

Konteks: *Ketua komisi A meminta dengan tegas anggota KPID agar mengulangi pembacaan dan penjelasan yang telah disampaikan ketua komisi A.*

Bentuk tuturan [102] adalah imperatif dengan maksud memerintah. Hal tersebut ditandai pilihan kata *kerjacobatanpa* alternatif honorifik, disertai tekanan kalimat yang tinggi sehingga mempertegas maksud

perinta
undang
merasa
anggot
sebelu
baca
ketua
memb
Denga
merasa
pentin
kontek

Strate

Se
dalam
bertut
tujuan
memin
sebag
[9]
kor
gul
[K
Ko
ku
(D
me

B
Gube
memi
tutura
strate
juan.
pilha
atau
dan
digun
status
pilha
diarti
Bertu
Alasa
F
adany

perintah anggota DPRD kepada para undangan. Namun, para undangan tidak merasa ditekan karena tuturan perintah anggota DPRD dianggap berkelakar karena sebelumnya anggota KPID tak pandai membaca tabel dan menjelaskannya sehingga ketua komisi A memperagakan contoh membaca yang baik seperti pembaca berita. Dengan cara seperti itu para undangan merasa terhibur dan merasa tuturan [102] penting dan wajar disampaikan dalam konteks seperti hal tersebut.

Strategi Langsung dalam Meminta

Secara fungsional strategi penyampaian dalam tindak permintaan dapat berupa (a) bertutur langsung dengan meminta persetujuan, (b) bertutur langsung dengan meminta alasan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

[9] Mana Bosmu, lagi tidur? Tidak ada kordinasinya. *Nanti sampaikan Pak gubernur.* Ini tidak bisa begitu ya! [KD/impr/mt/btt].

Konteks: *Anggota komisi D kelihatan kurang nyaman atas sikap mitra tutur (Dinas PU Pengairan) yang lamban mengatasi bobolnya bendungan.*

Bentuk tuturan [9] "Nanti sampaikan Pak Gubernur" berbentuk imperatif untuk meminta. Dengan bentuk seperti itu, maka tuturan anggota DPRD disampaikan dengan strategi langsung untuk meminta persetujuan. Kesantunan tindak tutur itu ditandai pilihan kata tugas *nanti* disertai nada datar atau ramah sehingga terkesan tidak memaksa dan menekan mitra tutur. Selain itu pula digunakan honorifik *Pak* untuk menghormati status orang yang dibicarakan (gubernur) dan pilihan kalimat *Ini tidak bisa begitu ya!* dapat diartikan sebagai permintaan persetujuan.

Bertutur Langsung dengan Meminta Alasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya strategi bertutur langsung dengan

meminta alasan dalam tuturan sebagai berikut.

[137] Itu mungkin yang jadi pertanyaan saya, terus yang kedua ini di Sulawesi Selatan mungkin yang mencapai 16 ton itu tidak semua kondisi tanah bisa mencapai itu karena faktor keilmuan mungkin yang tidak dicapai oleh masyarakat kita, sekarang kondisi tanah yang misalnya yang berpasir ada tantangan Pak, tanah merah. *Ini dicarikan solusi jenis tanaman atau bibit yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang tidak sesuai dengan iklim!* [KB/imprt/mt/ptn].

Konteks: *Tuturan anggota DPRD komisi B disampaikan dalam situasi santai ketika dari rapat pertanggungjawaban dan evaluasi APBD.*

Bentuk tuturan [137] adalah imperatif dengan maksud meminta alasan. Permintaan itu ditandai frasa *Ini dicarikan....* Dengan bentuk tersebut, terkesan tidak memaksa dan menekan mitra tutur. Digunakan pula kata ganti *kita* sebagai tanda kepentingan bersama (anggota DPRD dengan para undangan). Dengan strategi langsung seperti itu, tuturan meminta anggota DPRD menghormati para undangan. Selain itu pula permintaan anggota DPRD didahului alasan yakni *karena faktor keilmuan mungkin yang tidak dicapai oleh masyarakat kita, sekarang kondisi tanah yang misalnya yang berpasir ada tantangan Pak, tanah merah.* Dengan didahului alasan, tuturan [137] anggota DPRD tidak menekan dan tergolong halus dan santun dalam meminta.

Strategi Langsung dalam Melarang

Strategi langsung untuk melarang Mt secara berpeluang mewujudkan kesantunan negatif kepada Mt seperti berikut.

[36] Undangan : Haloo, itu anggota dewan menelpon tonji? Harus tawwa

bicara sama-sama kalau ada orang menelpon,,,,,,,,,,,,,,,,,Bisami dimulai kapan di pak?

DPRD : Saya tidak bisa langsung mulai kalau begini! Siapa yang bicara? *Jangan berbicara di ruangan ini selain orang yang saya beri kesempatan.....ya!* [KD/imptr/lrg/APTM]

Tamu : Siap

Konteks: *Disampaikan ketua komisi D kepada para undangan yang tampak kacau saat sidang berlangsung.*

Bentuk tuturan [36] adalah imperatif untuk melarang. Larangan ditandai modalitas *jangan*. Selain itu larangan anggota DPRD didahului oleh alasan-alasan. Tuturan anggota DPRD dipicu oleh ulah para undangan yang kurang tertib dalam mengikuti sidang rapat. Dalam konteks sosial seperti itu, maka tuturan anggota DPRD tergolong wajar dan santun. Kewajaran tuturan anggota DPRD karena wewenang yang diemban dan status kedudukannya sebagai wakil rakyat yang terhormat dan sesuai norma sosial budaya masyarakat Makassar pada umumnya.

Tampak pula larangan dari anggota DPRD kepada para undangan sebagai berikut.

[98] Undangan : Kami mohon maaf bahwa kami belum paham betul dengan apa yang dimaksud Bapak. Kami pada kesempatan ini berharap bimbingan dari Bapak Ibu sekalian, mohon untuk...)

DPRD: *Jangan pakai kata-kata mohon begitu, saya tidak pernah menyinggung orang dalam rapat-rapat seperti ini, jadi jangan gunakan bahasa, ini ada pengamat bahasa.* Memang saya tidak suka mendengar bahasa begitu, mohon bimbingan, mohon petunjuk, dari Tuhan yang maha kuasa, hehehe. Biasa-biasa saja

pak, kalau ndak ada yang bapak mau komentari ndak usah.

Konteks: *Disampaikan ketua komisi A dalam suasana akrab karena tuturan anggota DPRD bermaksud untuk mendidik atau menasehati para undangan yang bersikap merendah.*

Bentuk tuturan imperatif [98] untuk melarang ditandai modalitas *jangan*. Selain itu dengan pernyataan "Saya tidak pernah menyinggung orang dalam rapat-rapat seperti ini." Berarti rendah hati agar menguntungkan Mt. Tuturan anggota DPRD dipicu oleh ulah para undangan yang bermaksud menyenangkan atau memuji anggota DPRD dengan bahasa yang santun dalam mengikuti sidang rapat. Namun, ketua komisi A mengintrospeksi agar tuturan seperti *mohon petunjuk*, tidak digunakan karena wewenang anggota DPRD bukan atasan tetapi bersifat konsultasi semata. Dalam konteks seperti itu, maka tuturan anggota DPRD tergolong wajar dan santun sesuai norma sosial budaya masyarakat Makassar pada umumnya.

Strategi Tidak Langsung dengan Modus Interogatif

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa percakapan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang berbentuk interogatif dimaksudkan untuk meminta penjelasan. Hal tersebut secara jelas tampak pada data [37 dan 6] sebagai berikut.

[37] K.K.D : *Kita mau selesaikan masalah ini atau tidak?* Mari kita saling menghargai. [KD/intrg/mt/APTM].

APTM: Silahkan lanjut Pak.

Konteks: *Disampaikan oleh Ketua Komisi D (KKD) kepada Asosisasi Pengusaha Taksi Makassar dalam suasana agak ribut.*

Tu
kepada
dengar
tidak
tersebut
pertain
tampa
menur
modal
tidak
pengg
memir
santun

Strate Intero

H
(satu)
intero
[36] b
K.L
kal
Jar
ora
ke
AF
Ko
me
ku

T
kepac
denga
meng
kan
maks
pasar
Jang
yang
Deng
tidak
modu
yang

Tuturan [37] disampaikan ketua komisi D kepada para undangan (APTМ) sehu-bungan dengan rencana masuknya investor taksi yang tidak sesuai dengan prosedur. Tuturan tersebut disampaikan dalam bentuk pertanyaan dengan maksud meminta. Hal itu tampak pada pilihan kata *kita* yang menunjukkan hubungan solidaritas dan modalitas *atausehingga* permintaan tampak tidak tegas atau tidak memaksa. Karena itu penggunaan strategi tidak langsung untuk meminta dengan modus interogatif terkesan santun.

Strategi Tidak Langsung dengan Modus Interogatif untuk Melarang

Hasil penelitian ini hanya ditemukan 1 (satu) tindak melarang dengan modus interogatif. Hal tersebut tampak pada tuturan [36] berikut ini.

K.K.D : Saya tidak bisa langsung mulai kalau begini! *Siapa yang bicara? Jangan berbicara di ruangan ini selain orang yang saya beri kesempatan.....ya!*

APTМ : Siap!

Konteks: *Ketua komisi D tampak kesal melihat tingkah laku APTМ yang kurang tertib saat sidang berlangsung.*

Tuturan [36] disampaikan ketua komisi D kepada para undangan (APTМ) sehu-bungan dengan kurang tertibnya APTМ mengikuti sidang. Tuturan tersebut disampaikan dalam bentuk pertanyaan dengan maksud melarang. Hal itu tampak pada pasangan berdekatan dalam tuturan itu yakni *Jangan berbicara di ruangan ini selain orang yang saya beri kesempatan.....ya!* Dengan peristiwa tutur tersebut, strategi tidak langsung untuk melarang dengan modus interogatif menghaluskan larangan yang disampaikan anggota DPRD.

Strategi Tidak Langsung dengan Modus Deklaratif

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi tidak langsung untuk meminta bagi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga disampaikan dalam modus deklaratif. Hal tersebut secara jelas tampak dalam [4 dan 7] sebagai berikut.

3. Coba bicarakan dengan masyarakat di sana! Kan tidak terlalu (*anuji*) itu. *Tidak dibebankan itu masyarakat di sana.* [KD/dek/mt/btt].

Konteks: *Anggota komisi D menyakinkan mitra tuturnya agar mendekati masyarakat yang lahannya akan dilewati alat berat.*

Tuturan [4]disampaikan dalam bentuk pernyataan dengan maksud meminta. Penanda permintaan itu tampak pada frasa *tidak dibebankan itu*, dan pilihan kata *di sanakata* ganti penunjuk. Kedua penanda permintaan itu bersifat persuasif dan menghaluskan maksud dengan tidak menyebut nama mitra tutur dan lokasi yang dimaksud (di sana). Dengan peristiwa itu penggunaan strategi tidak langsung untuk meminta dengan modus deklaratif terkesan sangat santun.

7. Kalau kita mau menunggu sampai selesai masyarakat panen semakin banyak menderitа, gitu loh. [KD/dek/mt/btt]

Konteks: *Anggota komisi D berupaya mendesak dan menyakinkan mitra tuturnya agar ada solusi efektif dalam mengerjakan bendungan tanpa mengorbankan petani.*

Tuturan [7] disampaikan dalam bentuk pernyataan dengan maksud meminta. Penanda permintaan itu tampak pada frasa *semakin banyak yang menderitа dan gitu loh* yang berfungsi sebagai penegas. Selain itu, digunakan pula kata ganti *kita* yang berfungsi kooperatif. Dengan frasa dan kata ganti yang mengemban kesantunan, maka

strategi tidak langsung untuk meminta dengan modus deklaratif menghaluskan permintaan yang disampaikan anggota DPRD.

Bentuk imperatif yang mengemban kesantunan dalam tuturan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan dalam fungsi permintaan pada data [135 dan 136] yang berorientasi kepada solidaritas tinggi dan berasosiasi dengan posisi kehormatan Anggota DPRD Sulawesi Selatan yang lebih tinggi dari pada eksekutif dan masyarakat Makassar pada umumnya. Untuk menyatakan perintah [49 dan 82] menunjukkan adanya kesantunan yang berorientasi kepada solidaritas sosial sebagai wujud pertalian kasih sayang, tanpa terlalu menonjolkan penghormatan terhadap status. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Goffman (1967) bahwa kesopanan positif berorientasi kepada solidaritas dan meminimalkan perbedaan status dan kesopanan negatif sebagai kesopanan yang berorientasi kepada rasa hormat dan menghargai perbedaan status. Penggunaan kesantunan tersebut mencerminkan penggunaan bahasa yang dilatari oleh budaya Asia yang masih cenderung menekankan strategi rasa hormat (Lakoff, 1973).

Bentuk interogatif yang mengemban kesantunan dalam tindak direktif berupa (a) mengubah intonasi kalimat menjadi intonasi tanya seperti pada data 6 dan 12, (b) dengan menggunakan kata-kata tanya tertentu seperti pada data 1 dan 36, dan (c) menggunakan urutan tutur sebagai bentuk informasi sebelum menyatakan tujuan. Kelima tuturan anggota DPRD dalam tuturan interogatif untuk menyatakan permintaan, perintah dan larangan bersifat lugas dan langsung dengan menggunakan kata tanya. Dengan kata lain, bentuk interogatif dalam tindak tutur meminta penjelasan dan bertanya di dalam ruang sidang menunjukkan adanya kesantunan yang berorientasi kepada solidaritas sosial, tanpa terlalu menonjolkan penghormatan terhadap status. Bentuk tuturan interogatif untuk memerintah dan melarang

berorientasi kepada solidaritas sosial tinggi dan berasosiasi dengan ketegasan.

Bentuk deklaratif yang mengemban kesantunan dalam tindak direktif tampak sebagai berikut (1) bentuk kesantunan dalam tuturan deklaratif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dalam susunan inversi. Hal tersebut dapat dilihat pada data 7, 12, dan 26. Dengan menempatkan subjek kalimat setelah kata pokok, tidak menonjolkan penutur terkesan merendahkan diri untuk menghargai mitra tuturnya. (2) Bentuk deklaratif untuk menyatakan (a) permintaan penjelasan anggota DPRD terhadap para undangan digunakan oleh anggota dewan dengan memberdayakan fungsi modus dengan cara mendeklarasikan keadaan tidak tahu dan tidak dapat informasi yang secara pragmatik bermakna meminta penjelasan secara halus dan (b) perintah anggota DPRD terhadap para undangan berorientasi kepada kesantunan solidaritas yang berasosiasi dengan ketidaktegasan.

Penggunaan strategi langsung merupakan refleksi dari sikap kritis, adil, profesional, dan proporsional yang diamanatkan kode etik DPRD. Selain itu, berbicara lugas dan langsung juga didorong adanya kebutuhan untuk mengutamakan efisiensi dalam berkomunikasi. Walaupun ujaran yang bersifat lugas dan langsung merupakan sesuatu hal yang dikategorikan sebagai perilaku normatif di dalam rapat dewan, penelitian ini menunjukkan bahwa anggota dewan tetap melakukan upaya melebihi kelaziman tersebut untuk mencapai perilaku santun. Hal tersebut ditandai oleh penggunaan pilihan kata, dan panjang tuturan, serta urutan tutur untuk menjalin hubungan solidaritas secara harmonis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaklangsungan ujaran dalam rapat dewan diungkapkan dalam modus. Di dalam tindak tutur meminta penjelasan, ujaran tidak langsung direalisasikan modus deklaratif dan interogatif. Di dalam tindak tutur memberikan pendapat, ujaran tidak langsung

direalis
laratif.

Pe
sung d
lebih
penyar
langs
penyar
menun
menya
banyak
samar,
atau b
Jika
Makas
langs
kejuju
sponta
dikata
1999)

Kartor
strateg
mudah
denga
pemah

S
langs
menja
strate
bila p
bantu
bahw
dalam
didas
terseb
(1967
kepac
perbe
sebag
rasa
statu

SIM

P
bahw
angg

direalisasikan modus interogatif dan deklaratif.

Penggunaan strategi penyampaian langsung dalam tindak direktif anggota legeslatif, lebih dominan menggunakan strategi penyampaian langsung daripada strategi tidak langsung. Keberadaan penggunaan strategi penyampaian langsung yang dominan itu menunjukkan bahwa mereka cenderung menyampaikan pesan secara lugas, tidak banyak menyampaikannya secara samar-samar, ingin menunjukkan hubungan dekat atau berorientasi kepada kesantunan positif. Jika dipandang dari perspektif budaya Makassar, maka penggunaan strategi langsung itu menunjukkan nilai filosofis kejujuran, ketegasan, kejelasan, dan spontanitas. Hal itu sejalan dengan yang dikatakan Blum-Kulka (dalam Kuntarto, 1999), Searle (dalam Murtinich, 2001), dan Kartomihardjo (1993) bahwa penggunaan strategi langsung digunakan agar segera atau mudah dipahami oleh Mt dan dilakukan dengan mengandalkan dan mencapai pemahaman bersama.

Sementara itu, penggunaan strategi tidak langsung dimotivasi oleh kesantunan untuk menjalin hubungan harmonis. Penggunaan strategi tidak langsung dominan digunakan bila pelaku tutur menghendaki kesediaan dan bantuan mitra tutur. Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan strategi tidak langsung dalam tindak direktif anggota legislatif juga didasari perasaan malu atau sungkan. Hal tersebut sejalan apa yang dikatakan Goffman (1967) bahwa kesopanan positif berorientasi kepada solidaritas dan meminimalkan perbedaan status dan kesopanan negatif sebagai kesopanan yang berorientasi kepada rasa hormat dan menghargai perbedaan status.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa kesantunan tindak tutur direktif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,

mengekspresikan tuturannya yang meliputi bentuk, dan strategi seperti berikut ini.

Penggunaan tuturan dalam percakapan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan para eksekutif atau masyarakat pada umumnya di ruang sidang menunjukkan adanya bentuk kesantunan bervariasi. Dengan penggunaannya yang bervariasi itu menunjukkan kekhasan. Dapat dikatakan bahwa penggunaan modus imperatif dalam merealisasi tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat merupakan kelaziman yang bersifat perilaku normatif atau cenderung bersaing dengan tujuan sosial, sedangkan bentuk interogatif dan deklaratif dalam meminta penjelasan menunjukkan perilaku yang santun.

Terkait dengan penggunaan strategi penyampaian tindak tutur direktif yang mengemban kesantunan, strategi penyampaian langsung lebih dominan digunakan daripada strategi tidak langsung. Hal itu menunjukkan bahwa mereka cenderung menyampaikan pesan secara lugas, tidak banyak menyampaikannya secara samar-samar, menunjukkan hubungan dekat, atau berorientasi kepada kesantunan positif.

Berdasarkan temuan penelitian, ada pihak yang layak diberikan saran yaitu kepada orang tua dan peneliti berikutnya. Sebagai peletak dasar watak dan karakter anak. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk secara dini sikap dan perilaku manusia yang humanis dan santun dalam berbahasa. Perilaku komunikasi seseorang, baik verbal maupun nonverbal dapat tepat sesuai norma sosial dan budaya setempat.

Bagi peneliti berikutnya, agar dapat melanjutkan penelitian pada lingkungan luas seperti pada layanan publik untuk memantapkan sekaligus merepresentasikan secara utuh kesantunan berbahasa Indonesia dalam masyarakat tutur Makassar. Selanjutnya, diharapkan pula bagi peneliti berikutnya dapat lebih mendeskripsikan kesantunan nonverbal dengan memanfaatkan instrumen penelitian yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, H. 1992. *Modalitas dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Balai Pustaka
- Brown, P. & S.C. Levinson. 1987. *Politeness*. New York: Cambridge University Press.
- Brown, G. dan Yule, G. 1996. *Analisis Wacana*. Terjemahan oleh I Soetikno. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hymes, D. 1974. *Foundation in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. Philadelphia: University of Pennsylvan Press, Inc.
- Goffman, E.1981(b). Replies and Responses. *In Forms of Talk*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 5-77.
- Holmes 2000. *An Introduction to Sociolinguistics*. Harlow: Person Education.
- Kuntarto 1999. *Strategi Kesantunan Dwibahasawan Indonesia Jawa: Kajian pada Wacana Lisan Bahasa Indonesia*. Disertasi. Malang: PPs IKIP Malang.
- Kartomihardja 1993. *Bahasa Cermin Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: P2L-PTK.
- Martinich A.P. 2001. *The Philosophy of Language*. Fourth Edition. New York Oxford University Press.
- Miles dan Hebermas 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Searle, J. R.2001.*Indirect Speech Acts*. Dalam A.P. Martinich (Ed.). *The Philosophy of Language*. Oxford: OxfordUniversity Press.